

**MARGINALISASI AGAMA DAN ETNIS TIONGHOA DALAM RIWAYAT  
NEGERI YANG HARU\*)**

*(The Marginalization of Religion and Chinese Ethnicity in Riwayat Negeri yang Haru)*

Oleh/By:

Hudha Abdul Rohman, Lina Meilinawati Rahayu, Muhamad Adji

Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Padjadjaran  
Jalan Raya Bandung-Sumedang Km. 21 Jatinangor 45363  
email: hudhud.ok@gmail.com

\*) Diterima : 17 Januari 2018 , Disetujui : 18 April 2018

**ABSTRAK**

Tulisan ini membahas bagaimana bentuk-bentuk marginalisasi yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru dalam *Riwayat Negeri yang Haru: Cerpen Kompas Terpilih Tahun 1981—1990*. Kumpulan cerpen tersebut ditulis oleh 55 penulis dan dibukukan pada tahun 2006. Bentuk-bentuk marginalisasi dalam kumpulan cerpen tersebut dianalisis menggunakan pendekatan *new historicism* Stephen Grenblatt dan teori marginalisasi Alcock (1993). Melalui analisis mendalam ditemukan bahwa cerpen-cerpen *Kompas* terpilih tahun 1981—1990 tersebut merepresentasikan situasi dan kondisi sosial pemerintahan Orde Baru yang memarginalkan rakyat dan kelompok minoritas dari berbagai aspek seperti ekonomi, sosial, politik, dan agama. Marginalisasi ditunjukkan melalui berbagai fenomena sosial, khususnya yang berkaitan dengan agama dan etnis Tionghoa.

Kata kunci: marginalisasi, Orde Baru, cerpen, *Kompas*, *new historicism*

**ABSTRACT**

*This paper discussed over the forms of marginalization carried out by New Order government in Riwayat Negeri yang Haru. The Collection of Elected Kompas Short Stories was written by 55 authors and published in 2006. The forms of marginalization in the short story collection were analyzed using the new historicism approach of Stephen Grenblatt and the marginalization theory of Alcock (1993). Result of the research found that the elected Kompas short stories in 1981—1990 represent situations and social conditions of the new order government which marginalize people and minority groups from various aspects such as economical, social, political, and religious. The marginalization depicted through various social phenomena of religion and Chinese ethnic.*

*Keywords: marginalization, the new order, short story, Kompas, new historicism*

**PENDAHULUAN**

Tulisan ini membahas dan menguraikan bagaimana bentuk marginalisasi oleh pemerintahan Orde Baru yang direpresentasikan dalam

*Riwayat Negeri yang Haru: Cerpen Kompas Terpilih Tahun 1981—1990* (2006). Kumpulan cerpen *Kompas* 476 halaman tersebut terdiri atas 55 cerpen dengan Radhar Panca Dahana sebagai

editornya. Tulisan ini tidak membahas keseluruhan cerpen-cerpen tersebut, tetapi hanya yang terindikasi memuat isu marginalisasi yang dijalankan oleh pemerintahan Orde Baru. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Dahana (2006) bahwa *Riwayat Negeri yang Haru: Cerpen Kompas Terpilih Tahun 1981—1990* tersebut banyak menggambarkan posisi orang kecil yang terpinggirkan dalam kehidupan sosial, modernitas, serta mengalami represi politik dan ekonomi.

Selain marginalisasi dan ketertindasan, Agus Noor (2009) memandang bahwa dekade 1980-an dianggap sebagai titik balik pertumbuhan cerpen. Hal itu terlihat dari matangnya bentuk penceritaan para pengarang yang produktif pada periode tersebut. Bentuk penceritaan tersebut dapat memberikan gambaran kehidupan sosial, situasi kultural, dan rekam jejak sejarah masa Orde Baru. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Budianta (2006) bahwa sejarah terdiri atas berbagai teks yang memiliki versi masing-masing. Sejarah tersebut kemudian menjadi sumber inspirasi pengarang dalam membuat sebuah karya sastra sehingga sastra dapat menjadi dokumentasi sejarah.

Dalam pandangan *new historicism*, sastra dan sejarah dipandang sebagai sesuatu yang sejajar. Keduanya mampu menghadirkan rekam jejak situasi faktual dan masa lalu lewat imajinasi kebahasaannya. Purwanto (2003: 132-133) mengatakan bahwa sastra dan sejarah dapat diasosiasikan bergulat dalam satu bidang yang sama.

Keduanya saling terkait dalam menampilkan berbagai situasi pada masa itu. Sastra dan sejarah memiliki kebenaran yang relatif. Sastra mencoba merepresentasikan rekam jejak sejarah masa itu dan merespons bagaimana perubahan dan realitas sosial. Hal tersebut sesuai dengan pemikiran Grennblatt (2005:12) tentang pendekatan *new historicism* yang memahami bahwa sebuah karya sastra tidak hanya memberikan gambaran situasi kultural dalam suatu kurun masa tertentu, tetapi juga turut memengaruhi nilai sosial terhadap konteks kultural teks tersebut berada. Junus (1986:1) juga menegaskan bahwa sastra juga digunakan sebagai dokumen sosiobudaya yang mencerminkan suatu zaman. Oleh karena itu, sastra dapat menjawab bagaimana peristiwa pada zaman itu terjadi. Lukacs sebagaimana dikutip Taum (1997:3) juga menyatakan bahwa sastra merupakan cermin masyarakat dan menjadi sumber informasi tentang sejarah dan tata kemasyarakatan. Dengan demikian, *new historicism* dapat digunakan sebagai pendekatan untuk mengungkap dan memperlihatkan bagaimana sejarah dapat dibaca dari sebuah karya sastra yang merupakan reaksi terhadap situasi sosial sejarah zaman itu.

*Riwayat Negeri yang Haru: Cerpen Kompas Terpilih Tahun 1981—1990* banyak menggambarkan situasi dan kondisi rakyat pada saat pemerintahan Orde Baru. Tjondronegoro (1997:187) menyatakan bahwa pada masa itu pemerintah sangat gencar

mengarahkan pembangunan ekonomi, menciptakan atmosfer bagi pembangunan, dan memobilisasi potensi-potensi dan kreativitas masyarakat. Pembangunan ekonomi zaman Orde Baru tersebut pada satu sisi mulai menunjukkan hasil positifnya, tetapi pada sisi lain juga berdampak memarginalkan masyarakat yang tidak memberikan kontribusinya secara langsung untuk pemerintahan. Masyarakat tersebut merupakan kelompok minoritas, misalnya perempuan atau mereka yang berpendidikan rendah dan miskin.

Masyarakat marginal menurut Trikomo (1999) adalah mereka yang tidak dapat menyesuaikan dan melibatkan diri dalam proses pembangunan. Mereka masih berjuang melawan penderitaan, kelaparan, ketidakadilan, keterasingan, dan diskriminasi. Kelompok yang termarginalkan tersebut masuk ke dalam budaya yang terpinggirkan dan tidak dimasukkan ke dalam sistem yang dipakai dalam tatanan sosial. Sementara itu, menurut Alcock (1993) marginalisasi adalah fenomena ketidakseimbangan untuk mendapatkan peluang dalam aspek ekonomi, sosial, dan pendidikan. Hal tersebut kemudian ditegaskan kembali oleh Mullaly (2007:252) yang menyatakan bahwa "*marginalization has the potential to result in severe material deprivation, and in its most extreme form can exterminated groups. Marginalization is generally the social process of becoming or being relegated or confined to a lower social standing or outer limit or edge.*"

Marginalisasi mengakibatkan perampasan hak, membatasi kedudukan sosial sebuah kelompok, dan menempatkan posisi kelompok yang dimarginalkan tersebut di bawah (rendah). Proses ini terjadi karena adanya perbedaan kelas, etnis, gender, dan peran sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

*Riwayat Negeri yang Haru: Cerpun Kompas Terpilih Tahun 1981—1990* banyak menggambarkan marginalisasi kaum minoritas oleh pemerintahan Orde Baru pada tahun 1981—1990. Saratnya isu sosial masyarakat yang diangkat di dalam cerpen-cerpen tersebut menunjukkan keterkaitan yang kuat dengan gambaran situasi kultural zaman Orde Baru. Secara khusus masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimana marginalisasi terhadap agama dan etnis Tionghoa yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru yang terepresentasi dalam cerpen *Kompas* terpilih 1981—1990 tersebut?

Sebagaimana yang sudah diungkapkan sebelumnya bahwa tidak semua cerpen dalam *Riwayat Negeri yang Haru: Cerpun Kompas Terpilih Tahun 1981—1990* dibahas dalam tulisan ini, tetapi hanya "Gereja Kami yang Sempit (1986) dan "Kenalan di Awang-awang" (1988). Kedua cerpen tersebut memuat marginalisasi yang dominan sehingga dapat merepresentasikan situasi dan kondisi sosial pemerintahan Orde Baru tahun 1981—1990 yang berpengaruh besar terhadap kehidupan sosial masyarakat di Indonesia pada masa itu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesewenang-wenangan pemerintahan Orde Baru tidak hanya mendominasi kancah politik, tetapi juga seluruh aspek kehidupan masyarakat. Di situlah peran sastra sebagai representasi, cermin sosial, dan perekam sejarah yang independen menjadi nyata. Karena berfungsi sebagai cermin realitas, makna dalam *Riwayat Negeri yang Haru: Cerpen Kompas Terpilih Tahun 1981—1990* ini dapat diartikan sesuai dengan konteks sejarah Orde Baru.

### Marginalisasi Agama

Cerpen berjudul “Gereja Kami yang Sempit” dapat diartikan sebagai cermin terjadinya marginalisasi terhadap agama tertentu. Dari judul tersebut dapat ditarik asumsi dasar mengenai bentuk marginalisasi yang terjadi. Ada keterkaitan makna antara kata *sempit* dan kata *marginal* yang kemudian direkonstruksikan dalam cerpen sebagai sebuah gereja. Kata *marginal* berarti sesuatu yang berhubungan dengan batas, sedangkan kata *sempit* berarti kurang dari ukuran yang diperlukan. Kedua kata tersebut memiliki arti sebuah proses yang memberikan batas-batas tertentu. Jadi, judul cerpen “Gereja Kami yang Sempit” dapat diartikan sebagai simbol representasi pembatasan atau marginalisasi terhadap pemeluk suatu agama yakni Kristen.

Harus berjuang keras untuk mendapat tempat duduk di gereja. Dan panasnya berlebihan buat tubuh tuanya. Ia merasa sesak dan terkejut mendengar pengumuman bahwa

pesta paskah yang sudah dekat akan diselenggarakan di gedung pertemuan berhubung gereja tak muat (hlm. 257).

Kutipan cerpen tersebut juga menggambarkan kondisi menjelang akhir tahun 1990-an. Pada saat itu kedudukan agama Kristen terdesak dalam kursi pemerintahan. Hal itu dapat dilihat dalam kutipan, “Harus berjuang keras untuk mendapat tempat duduk di gereja”.

Aritonang (2004:363) mengungkapkan bahwa pada pertengahan pertama Orde Baru, baik Islam maupun Kristen berlomba-lomba mengembangkan diri dan memantapkan perannya di tengah kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang politik. Pada tahun-tahun tersebut, agama Kristen berkembang kuat. Salah satu penyebabnya adalah bubarnya PKI sehingga banyak yang berbondong-bondong memeluk Kristen karena tidak ada tempat bagi masyarakat yang tidak beragama.

Melihat kedudukan Kristen yang menguat di pemerintahan, pada periode selanjutnya pihak Islam pun mulai menguatkan posisinya. Akibatnya, pergeseran kursi politik beralih ke Islam dan membuat pihak Kristen terdesak dan termarginalkan. Melalui tokoh Harun, penguatan atas marginalisasi terhadap pemeluk agama Kristen diulang beberapa kali, antara lain, “Gereja telah sangat sempit....Gereja telah penuh jemaah dan luber ke halaman yang berdiri di tenda” (hlm. 268).

Kutipan tersebut berkaitan dengan perkembangan agama Kristen pada

masa awal Orde Baru. Melihat perkembangan tersebut, muncullah isu kristenisasi dalam masyarakat sehingga para tokoh muslim yang ekstrem merasa khawatir dan terancam. Sensitivitas antaragama yang terlalu tinggi menyebabkan pengikut Kristen kesulitan melebarkan bangunan gereja atau mendirikan rumah ibadah. Konflik-konflik SARA pada awal periode Orde Baru (sejak 1967) yang melibatkan Islam dan Kristen pun mulai marak, misalnya peristiwa Makasar, pembakaran sejumlah gereja di Aceh, pembunuhan pendeta Gereja Anglikan di Jakarta, dan sebagainya.

Apakah tak ada jutawan yang berpikir tentang membangun gereja baru, keluhnya. Apakah walikota tak mengizinkan adanya gereja baru? Apakah gereja tua ini telah terlalu sempit buat jemaah di kota kecil ini (hlm. 257).

Kutipan tersebut dapat dimaknai sebagai berikut. Pertama, tokoh Harun mengeluhkan bahwa gereja di kotanya sudah tidak dapat lagi menampung para jemaah untuk beribadah. Kedua, tidak semua penduduk dapat bebas datang ke gereja atau hanya datang pada waktu yang sudah dijadwalkan. Ketiga, pembatasan aktivitas ibadah terhadap penganut agama Kristen.

Perubahan sosial politik Orde Baru cenderung mengarah ke Islam, salah satu contohnya adalah dengan pembentukan majelis ulama tingkat pusat yang berguna untuk menjawab tantangan dan kebutuhan pembangunan. Pada tahun 1975

dibentuklah sebuah lembaga resmi yang didirikan oleh Presiden Soeharto dengan nama Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kedudukan MUI menjadi organisasi sosial keagamaan yang tidak mempunyai wewenang dan kekuatan apa-apa karena ruang gerak yang terbatas dan cenderung mengikuti keinginan pemerintah Orde Baru yang menekan (Aritonang, 2004).

Hal itu justru menyebabkan situasi politik semakin memanas. Mulai muncul oknum-oknum tertentu yang membawa isu-isu agama. Akibatnya, timbullah banyak kecurigaan dari berbagai golongan.

Persoalan jadi jauh lebih rumit dan mengkhawatirkan, ketika perkembangan selanjutnya justru menyeret agama-agama menjadi bagian *power struggle* yang sedang berlangsung. Menjelang akhir dekade 1980-an dan memasuki dekade 1990-an, pertentangan antara Soeharto dengan kelompok militer, terutama menyangkut pengurangan dominasi peran militer dalam birokrasi, dan sumber ekonomi menjadi semakin tajam (Dharmaputra, 2005:80)

Melihat situasi yang terus-menerus menegang, pemerintah tidak tinggal diam. Pemerintah pun mengadakan musyawarah antaragama untuk meredakan konflik tersebut. Dalam musyawarah tersebut ada beberapa poin yang harus disepakati oleh kedua belah pihak.

Untuk menekan marginalisasi agama, pemerintah mengeluarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9

dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. Salah satu prinsip dalam peraturan bersama menteri tersebut adalah pemberian kepastian pelayanan secara adil, jelas, dan terukur kepada pemohon pendirian rumah ibadah. Peraturan bersama menteri tersebut juga tidak membatasi seseorang untuk mendirikan rumah ibadah.

### **Marginalisasi Etnis Tionghoa**

Selain agama, marginalisasi juga terjadi terhadap etnis Tionghoa. Fenomena tersebut diungkap dalam cerpen “Kenalan di Awang-Awang” melalui dialog tokoh aku dan lawan bicaranya di pesawat, Sonny. Hal itu dapat terlihat dalam kutipan berikut.

Gila! Aku jadi malas lagi buat ngobrol dengan dia. Padahal dia simpatik. Mana setelan jasnya dari wol luar negeri yang mahal. Dasinya yang lucu, kupu-kupu. Ataukah disebabkan oleh mata sipitnya itu? Tapi sejak kapan aku jadi rasialis? Bapak Sraninya anakku yang bungsu saja keturunan Cina. Malah tak sedikit teman baikku dari antara mereka (hlm. 332).

Kutipan tersebut menunjukkan ketidaksukaan tokoh *aku* terhadap Sonny yang memiliki mata sipit. Kata “sipit” merupakan simbol fisik etnis Tionghoa dan memiliki makna negatif. Hal itu sangat disayangkan karena

mengacu pada sentimen primordial. Sebutan “China” oleh sebagian besar rakyat Indonesia dan perlakuan militer mampu mendiskreditkan dan memarginalkan etnis Tionghoa. Pada masa Orde Baru etnis Tionghoa selalu berusaha menghindari wilayah politik karena dianggap menakutkan. Pemerintah pun juga membatasi aktivitas politik mereka. Hal itu terlihat dalam kutipan berikut..

“Maaf Pak. Tentu Bapak ini mengira ini saya nonpri, kan?” Tiba-tiba dia memojokkan aku. Dan entah karena biasa terus terang, kepalaku ternyata spontan mengangguk (hlm. 332).

Pada dialog tersebut terlihat penggunaan kata *nonpri* yang merupakan singkatan dari nonpribumi. Kata tersebut untuk membedakan pribumi dari nonpribumi.. Pribumi adalah penduduk asli atau WNI keturunan asli Indonesia. Adapun nonpribumi diartikan sebagai pendatang atau bukan WNI asli Indonesia. Penggunaan kata pribumi dan nonpribumi secara tidak langsung memunculkan diskriminasi terhadap etnis lain. Marginalisasi tersebut tidak hanya terjadi dalam sistem administrasi pemerintahan, tetapi juga dalam masyarakat. Salah satunya perihal berkeluarga sebagaimana terlihat dalam kutipan berikut.

“Ooh, saya tidak heran Pak. Calon mertua saya sendiri, tapi dulu lo ini, semula ragu-ragu. Namun, berhasil saya yakinkan. Tapi waktu orang tua dan keluarga datang meminang, eee, kembali mereka ragu-ragu lagi.

Habis, Pak, kami tidak ada yang berkulit kehitam-hitaman. Mana mata sipit semua.” (hlm. 332).

Tidak hanya mempermasalahkan perbedaan keturunan, kutipan dialog yang diucapkan oleh Sonny tersebut melebar pada perbedaan warna kulit. Sebagian besar warna kulit orang Indonesia adalah sawo matang atau kecokelatan. Penggunaan kata *kehitam-hitaman* justru menunjukkan rasialisnya terhadap masyarakat lainnya. Fanatisme dan sentimen rasial tersebut mengarah pada sebuah ketidaksukaan satu kelompok terhadap satu ciri fisik kelompok lain yang dianggapnya berbeda. Hal ini tentu akan menimbulkan konflik horizontal.

Nasikun sebagaimana dikutip La Ode (2012: 1) mengatakan bahwa struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh dua ciri yang bersifat unik. Secara horizontal, hal itu ditandai oleh kesatuan sosial berdasarkan suku, bangsa, agama, adat-istiadat, dan kedaerahan. Secara vertikal, struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh lapisan atas dan lapisan bawah.

Perbedaan struktur horizontal mengakibatkan kecenderungan sentimen primordialisme yang tinggi dalam masyarakat tradisional. Akibatnya, muncul kepentingan-kepentingan yang berbeda setiap kelompok. Kemudian kelompok-kelompok tersebut akan terbagi lagi menjadi mayoritas dan minoritas dalam sebuah masyarakat yang majemuk. Oleh karena itu, kondisi yang demikian sangat rawan menimbulkan konflik.

Melalui dialog Sonny dalam cerpen tersebut terlihat bahwa dirinya lebih menyukai Orde Lama ketimbang Orde Baru (Hoerip dalam Dahana, 2006:334). Ketidaksukaan Sonny terhadap pemerintahan Orde Baru karena dirinya—mewakili etnisnya—sering menjadi korban marginalisasi masyarakat dan pemerintah Orde Baru.

Diskriminasi dan penyerangan terhadap etnis Tionghoa dapat terlihat dalam foto berikut.



Penyerangan Secara Fisik yang Dilakukan oleh Pemuda terhadap Mahasiswa Etnis Tionghoa

(sumber: <http://bbc.com/indonesia/dunia>)

Pada awal Orde Baru, Soeharto mengeluarkan beberapa peraturan dan kebijakan yang secara sepihak semakin memarginalkan etnis Tionghoa dan membatasi gerak dan hak-hak mereka sebagai WNI. Produk-produk hukum tersebut adalah sebagai berikut.

1. SE.02/SE/Ditjen/PPG/K/1988 mengenai larangan “Penerbitan dan Percetakan Tulisan/Iklan Beraksara dan Berbahasa China”.
2. Instruksi Presiden No.14/1967 mengenai “Agama, Kepercayaan, dan Adat-istiadat China”.
3. Instruksi Mendagri No. 455.2-360/1968 mengenai “Penataan Klenteng”.
4. Perda Dati I DKI Jakarta mengenai “K-1/OS-II/OS-12”.

5. SE Presidium Kabinet RISE-06/Pres-Kab/6/1967 mengenai “Penggantian Istilah Tiongkok dan Tionghoa menjadi China”.
6. Statblad mengenai “Catatan Sipil untuk Golongan Timur Tionghoa”.
7. Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera No. E.06/Pres.Kab/6/1967 tanggal 28 Juni tentang “Penggantian penyebutan etnis Tionghoa dengan China”.
8. Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/Kep/12/1966 tentang “Prosedur Ganti Nama bagi Warga Negara RI yang Memakai Nama China Berdiam di Luar Negeri” (Winarta, 2009:127).

Produk-produk hukum tersebut jelas memperlihatkan ketidakadilan dan pemarginalan atas etnis Tionghoa. Diskriminasi tersebut terjadi karena dominasi golongan pribumi pada kelompok yang lain.

Kekerasan politik pada masa Orde Baru memuncak pada tahun 1998 dan lebih dikenal dengan istilah tragedi Mei 1998. Peristiwa itu dianggap sebagai representasi ketimpangan perekonomian antara penduduk pribumi dan etnis Tionghoa. Etnis Tionghoa dianggap sebagai penyebab ketimpangan sosial karena rezim Orde Baru dinilai memberikan keistimewaan ekonomi kepada mereka (Andalas, 2008).

Pada akhir cerpen terlihat semacam paradoks atau ironi ketika tokoh *aku* mendengar alasan Sonny ditangkap oleh keponakannya di Singapura, yaitu terlihat pada kutipan “Apa sebenarnya yang terjadi semalam? Apakah orang-orang yang dia borgol tersebut sisa-sisa PKI yang

berhasil menyelip sejenak ke Indonesia?” (hlm. 336). Tokoh *aku* mengira Sonny adalah sisa-sisa PKI yang menyelip ke Indonesia atau anggota sindikat narkoba. Dari kutipan itu terlihat marginalisasi rasial tokoh *aku* terhadap Sonny karena banyaknya sindikat narkoba yang berasal dari Cina. Pada masa pemerintahan Orde Baru, isu PKI juga menjadi pembahasan yang menakutkan dan mengancam. PKI dibentuk pada tahun 1914 dan dibubarkan pada tahun 1965 karena dinyatakan sebagai partai terlarang. Akan tetapi, pada tahun setelahnya, PKI masih diisukan berkembang dan muncul di kehidupan masyarakat.

## SIMPULAN

*Riwayat Negeri yang Haru: Cerpen Kompas Terpilih Tahun 1981—1990* menampilkan marginalisasi yang dilakukan oleh rezim Orde Baru yaitu marginalisasi terhadap agama dan etnis Tionghoa. Rezim Orde Baru memiliki orientasi kekuasaan yang hanya berfokus pada kuasa ekonomi. Akibatnya, kelompok kecil dan minoritas termarginalkan sehingga tidak mendapatkan keadilan dan kesejahteraan hidup. Melalui cerpen-cerpen tersebut kita dapat memahami situasi dan kondisi sosial pada tahun 1981—1990.

Hal tersebut sesuai dengan pendekatan *new historicism* Stephen Greenblatt yang menekankan keterkaitan antara teks sastra dan berbagai aspek kekuatan sosial, ekonomi, dan politik yang melingkupinya. Pendekatan tersebut



digunakan sebagai upaya untuk melihat dan membongkar fenomena ideologi, politik, dan sosiokultural pada masa itu. Fenomena tersebut terepresentasikan dalam *Riwayat Negeri yang Haru: Cerpen Kompas Terpilih Tahun 1981—1990* yang mencoba menyejajarkan teks sastra dan nonsastra untuk membaca dan mengungkap sejarah dalam karya sastra.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alcock, P. (1993). *Understanding Poverty*. London: Mac Millan Press Ltd.
- Andalas, P.M. (2008). *Kesucian Politik: Agama dan Politik di tengah Krisis Kemanusiaan*. Jakarta: Penerbit Libri.
- Aritonang, J.S. (2004). *Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Budianta, M. (2006). “Budaya, Sejarah, dan Pasar: New Historicism dalam Perkembangan Kritik Sastra” dalam jurnal. *Susastra* Volume 2 No. 3.
- Dahana, R.P. (ed). (2006). *Riwayat Negeri yang Haru: Cerpen Kompas Terpilih 1981—1990*. Jakarta. Penerbit Buku Kompas.
- Dharmaputra, E. (2005). *Pergulatan Kehadiran Kristen di Indonesia*. Jakarta: BPK Gunung Mulia
- Greenblatt, S. (2005). *Renaissance Self Fashioning*. Chicago: The University Chicago Press.
- <http://bbc.com/indonesia/dunia>. “Penyerangan Secara Fisik yang Dilakukan oleh Pemuda terhadap Mahasiswa Etnis Tionghoa”. Diunduh 25 Januari 2018.
- Junus, U. (1986). *Sosiologi Sastra: Persoalan Teori dan Metode*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementrian Pelajar Malaysia.
- La Ode, M. D. (2012). *Etnis Cina Indonesia dalam Politik: Politik Etnis Cina Pontianak dan Singkawang di Era Reformasi 1998-2008*. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia.
- Mullaly, B. (2007). *Oppression: The Focus of Struktural Social Work*. Don Millis: Oxford University Press, hal. 252-286.
- Noor. Agus. (2009). *Periode Keemasan Kedua Cerpen Indonesia*. Jakarta: Kompas
- Purwanto, B, (2003). “Historisisme Baru dan Penulisan Sejarah,” dalam *Sastra Interdisipliner* (ed. Muh. Arif). Yogyakarta: Qalam.
- Taum, Y. Y. (2013). “Representasi Tragedi 1965: Kajian New Historicism Atas Teks-teks Sastra dan Nonsastra Tahun 1966-1998”. Disertasi. Yogyakarta: Pascasarjana Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada.
- Trikomo, Y.A. (1999). *Pemulung Jalanan Yogyakarta: Konstruksi Marginalitas dan Perjuangan Hidup dalam Budaya-Budaya Dominan*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Tjondronegoro, SM. P. (1997). *Gejala Organisasi dan Pengembangan Berencana dalam Masalah-masalah Pembangunan*. Bunga

*Rampai Antropologi Terapan.*  
Jakarta: LP3ES.

UU No. 31 Tahun 1999 UU dan No.  
20 Tahun 2001 Tentang  
Pemberantasan Tindak Pidana  
Korupsi.

Winarta, F.H. (2009). *Suara Rakyat  
Hukum Tertinggi.* Jakarta:  
Penerbit Kompas.